

Paskah dan Ambtenaar Baru

Oleh: Hendra Kurniawan

HARIMinggu 5 April 2015, umat Kristiani merayakan Paskah. Perayaan Paskah merujuk pada kebangkitan Yesus yang menang mengalahkan maut. Dengan merayakan Paskah, kita diajak untuk turut ambil bagian dalam misteri kebangkitan. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan kebangkitan ialah hasrat untuk memperbarui hidup dan berani menolak godaan dosa. Demikian pula yang diajarkan kepada para pemimpin. Melalui misteri Paskah, Yesus memberi contoh kepemimpinan yang rela melayani, memberikan diri secara tulus, serta berani melawan nafsu kekuasaan dan ketidakberesan.

Untuk urusan politik, model kepemimpinan yang melayani dan tulus sangat sulit dijumpai. Baiklah kita coba meneliksinya sejak zaman Hindia Belanda. Dalam sejarah kolonial dikenal istilah *ambtenaar* yang merujuk pada pegawai negeri pemerintah Hindia Belanda. Kesempatan untuk menjadi *ambtenaar* juga terbuka bagi kaum bumiputera. Untuk itu, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah sekolah untuk mendidik para calon pegawai negeri yang disebut Sekolah Raja (*Hoofdschool*). Dari sebutannya tampak bahwa mereka yang dididik di sini memiang dibentuk menjadi "raja-raja kecil" lengkap dengan kekuasaannya dalam urusan peme-

rintahan.

Tahun 1890, Sekolah Raja diubah namanya menjadi OSVIA (*Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaaren*) atau Sekolah untuk Pendidikan Pegawai Bumiputera. Perubahan nama tidak serta merta mengubah pandangan mereka yang ada di dalamnya. Menjadi pegawai negeri saat itu masih dianggap sebagai cara ampuh bermobilitas sosial vertikal naik. Feodalisme yang saat itu telah merekat erat dalam masyarakat Jawa segendang sepenarian dengan Belanda yang membawa ciri sama dari negerinya.

Lekatnya budaya feodal membuat pegawai negeri pada masa itu cenderung menempatkan diri sebagai pangreh praja. Kalangan bumiputera yang berhasil menjadi *ambtenaar* merasa memiliki prestise dan menyandang privilege. Mereka berlaku layaknya para penguasa feodal sebagai kaum priyayi baru. Kelas baru ini seolah lupa bagian utamanya sebagai abdi negara, lalu menuntut penghormatan berlebihan, pengakuan absolut akan kekuasaannya, dan merasa harus dilayani bukan melayani. Memasuki alam kemerdekaan ditinggah kemajuan



zaman ternyata tidak mengubah banyak pandangan ini.

Bukan lagi ambtenaar

Para pejabat khususnya penyelenggara negara dari presiden hingga bupati/walikota saat ini merupakan jabatan politis. Mereka dipilih langsung orang rakyat dan bukan sebagai pegawai negeri atau pejabat karier. Logikanya dengan sistem yang demikian ini, mereka memiliki dukungan kuat untuk berada dalam posisi pembela rakyat. Jabatan yang mereka sandang merupakan amanat dari rakyat dan untuk rakyat. Mereka adalah pemimpin rakyat yang bertugas sebagai pelayan bukan para *ambtenaar* baru yang minta untuk dilayani.

Sayangnya pemimpin yang benar-benar konsisten dengan visinya yang pro rakyat dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berani mempertaruhkan kedudukannya sebagai gubernur dengan menolak masuknya dana siluman dalam APBD. Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang berhasil menyulap Surabaya menjadi kota yang bersih, teratur, tertata, dan lebih hijau. Risma pernah

hendak mengundurkan diri ketika ada beberapa hal yang menurutnya tidak lurus, seperti pelantikan wakil walikota yang tidak sesuai prosedur hingga masalah pembangunan jalan tol. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tegas dalam melakukan bersih-bersih birokrasi yang dipimpninya. Semoga ketulusan mereka ini tidak pernah pudar dan dapat menjadi contoh bagi pemimpin lainnya.

Hadirnya pemimpin yang berani, tegas, dan mau melayani rakyat dengan tulus mutlak diperlukan. Jangan sampai pemimpin hanya mengurus perutnya sendiri dan abai pada penderitaan rakyat. Pemimpin yang mau berkorban dan merendahkan dirinya niscaya akan ditinggikan oleh rakyat. Dia akan tetap dihormati sekalipun telah menanggalkan jubah feodalnya.

Pemimpin yang mau bersentuhan langsung dengan rakyat - bukan semata-mata secara fisik, namun juga hati - akan dicintai dan dibela oleh rakyat. Pemimpin sejati memang harus rela kehilangan kenyamanan dan "ketampanan" demi keselamatan rakyat seperti dimaknai dalam Paskah. Selamat Paskah 2015! ***

Hendra Kurniawan MPd, Dosen Pendidikan Sejarah, Juru Bicara Lingkar Studi Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.